

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era Otonomi Daerah sekarang ini, pembangunan pariwisata banyak mendapat sorotan baik oleh pemerintah, maupun media massa, hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan pariwisata sebagai penambah devisa negara diluar sektor non migas. Rancangan program pembangunan pariwisata yang dicanangkan sejak tahun 1988, diharapkan menarik wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik. Sehubungan dengan itu, maka usaha pemerintah dalam mewujudkan tujuan nasional yaitu dengan melakukan pembangunan diberbagai sektor seperti pertanian, industri, perikanan dan pariwisata sebagai peningkatan pendapatan.

Pembangunan sektor pariwisata merupakan bagian dari pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan sektor-sektor lain. Oleh karena itu, keberhasilan pariwisata turut menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan pembangunan pariwisata nasional sebagai sektor pembangunan yang dapat diandalkan untuk memperbesar penerimaan devisa, memperluas kesempatan kerja dan lapangan usaha, mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kegiatan ekonomi, memperkenalkan alam dan nilai budaya bangsa serta memupuk

... p... ..

Pengembangan pariwisata melibatkan semua lapisan masyarakat, mulai dari kalangan atas sampai lapisan bawah, baik kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat biasa, diharapkan turut membantu dan menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata, partisipasi masyarakat sekitar obyek wisata dapat berupa partisipasi secara tidak langsung mempengaruhi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Hal ini berupa pemeliharaan situasi dan kondisi obyek wisata yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan penuh kenangan sehinggadapat mendorong wisatawan untuk berkunjung ke lokasi tersebut dan tinggal lebih lama, sehingga dengan demikian dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membuka lapangan kerja baru berupa pelayanan terhadap kebutuhan wisatawan selama tinggal di obyek wisata tersebut. Partisipasi secara langsung berupa pemanfaatan peluang pasar dalam bentuk usaha-usaha yang terkait dengan kegiatan pemasaran sarana penunjang pariwisata, sehingga dengan demikian pengembangan obyek wisata dapat memberi penghasilan terhadap masyarakat sekitarnya, dengan demikian akan dapat meningkatkan pendapatannya.

Agar sektor pariwisata dapat menjalankan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat umum merupakan satu prasarana untuk mencapai keberhasilan pembangunan pariwisata, dalam kegiatannya hampir menyentuh seluruh segi kehidupan masyarakat dan merupakan kegiatan yang sangat dipengaruhi dan memerlukan dukungan masyarakat umum yang terkoordinasi dengan pemerintah.

Kepariwisataan merupakan salah satu andalan Kabupaten Magelang dalam meningkatkan PAD.¹ Oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten Magelang harus berusaha mengembangkan potensi pariwisata yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga daerah Kabupaten Magelang.

Dalam menentukan program-program pembangunan daerah diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam serta potensi daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi wisata tersendiri. Obyek wisata berupa wisata alam maupun wisata yang terdapat di daerah yang belum dikelola secara maksimal.

Salah satu potensi Kabupaten Magelang adalah pariwisata. Potensi pariwisata ini didukung oleh letak Kabupaten Magelang yang berbatasan langsung dengan Propinsi D I Yogyakarta yang merupakan pintu gerbang wisata internasional. Contoh potensi wisata yang ada di Kabupaten Magelang adalah Candi Borobudur dan Kawasan Gunung Merapi dan Merbabu.

Secara umum upaya untuk pengembangan pariwisata alam memiliki peluang yang besar. Hal ini dapat dilihat dari berbagai potensi alam yang dimiliki oleh negara kita secara umum dan Kabupaten Magelang dalam skala yang sangat mikro. Dengan melihat berbagai potensi yang ada di Kabupaten Magelang seperti keberadaan gunung-gunung berapi, sungai, dan lahan pertanian yang mendominasi kawasan serta budaya masyarakat yang masih

¹ *Renstra Kabupaten Magelang 2002-2005*

tradisional, maka peluang pengembangan pariwisata alam dapat dijadikan alternatif untuk wilayah Kabupaten Magelang.²

Dengan potensi-potensi yang dimilikinya tersebut Kabupaten Magelang perlu membuat strategi-strategi pengembangan sektor pariwisata yang saling mendukung pengembangan sektor lain. Pembangunan pariwisata di Kabupaten Magelang bertujuan untuk memperbesar penerimaan devisa, pendapatan daerah, memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menunjang pembangunan daerah dengan tetap terpeliharanya nilai-nilai budaya bangsa dan agama serta kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan pariwisata juga diarahkan untuk mendorong pengembangan pengenalan dan pemasaran produk daerah. Sedangkan kebijaksanaan khusus pembangunan pariwisata adalah pengelolaan seluruh kegiatan pariwisata dapat meningkatkan pemanfaatan seluruh potensi dan usaha jasa serta Sumber Daya Manusia (SDM) wisata secara maksimal.

Tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan bidang kepariwisataan adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memberdayakan ekonomi masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan pengenalan pemasaran produk wisata melalui berbagai promosi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya pengembangan pariwisata menjadi sangat penting karena dapat turut mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Beberapa permasalahan

yang mempengaruhi upaya pengembangan pariwisata antara lain : banyaknya obyek wisata yang ada di Kabupaten Magelang sehingga belum bisa diakomodir secara maksimal; Kurangnya dana APBD II untuk meningkatkan obyek wisata yang ada sehingga siap untuk dipasarkan; sarana dan prasarana yang menunjang ke obyek wisata seperti jalan untuk menuju ke lokasi obyek wisata, transportasi/ketersediaan kendaraan umum menuju lokasi obyek wisata, papan penunjuk wisata yang akurat yang kesemuanya itu belum terpenuhi secara maksimal; minimnya jumlah kuantitas atau kualitas tenaga kerja pariwisata yang mempunyai wawasan bisnis; tingkat pemahaman dan kesadaran wisata masyarakat secara umum masih minim, terkadang baik masyarakat dan pelaku industri pariwisata belum menunjukkan sikap yang mendukung terhadap wisatawan serta kesadaran masyarakat di sekitar obyek wisata yang ada untuk penerapan SAPTA PESONA (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Ramah, Indah dan Kenangan) sehingga wisatawan masih merasa tidak nyaman di obyek wisata; pariwisata merupakan program investasi sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak untuk promosi yang belum terwujud secara maksimal.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

“ Strategi apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengembangkan pariwisata tahun 2003 ?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

I. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah :

1. Untuk memperoleh gelar S1 jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang dalam mengembangkan pariwisata.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat Dinas Pariwisata dalam mengembangkan pariwisata.

II. Manfaat Penelitian

Mengetahui bagaimana strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang dalam mengembangkan dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke obyek wisata yang ada di kabupaten Magelang.

D. Kerangka Dasar Teori

Sebagai pedoman dan petunjuk dalam memecahkan masalah dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori-teori yang diharapkan dapat memberikan arah dalam menjelaskan fakta-fakta baru yang biasanya menyimpang dari keadaan sebelumnya. Pentingnya penggunaan teori dalam penelitian seperti yang diungkapkan oleh Zamroni: Suatu penelitian yang akan mampu menghasilkan teori untuk menjelaskan fenomena yang dihadapi

dengan memuaskan kalau teori yang dihasilkan oleh penelitian tersebut didasarkan kerangka yang baik.³

Teori adalah sekumpulan konsep, definisi dan proposisi yang kait-mengkait yang menghadirkan suatu tujuan secara sistematis atas fenomena yang ada dengan menunjukkan secara spesifik hubungan-hubungan diantara variabel-variabel yang terkait dalam fenomena dengan tujuan memberikan eksplanasi dan prediksi atas fenomena tersebut. Dapat dikatakan teori sosial adalah terdiri dari pernyataan-pernyataan yang bersifat abstrak dan umum yang bertujuan menerangkan bagaimana dan mengapa beberapa aspek dari kenyataan dalam bermasyarakat (baik kenyataan itu dapat diketahui secara langsung maupun tidak).⁴

1. Manajemen Strategis

Ada beberapa ahli yang mendefinisikan pengertian manajemen

1. Henry M Boetinger.⁵

Berpendapat bahwa manajemen itu suatu seni yang membutuhkan tiga unsur yaitu :

- a. Pandangan seniman
- b. Pengetahuan dan teknis
- c. Teknik dan komunikasi yang berhasil.

Dalam hal ini manajemen merupakan suatu seni, maka manajemen memerlukan tiga unsur tersebut. Oleh karena itu ketrampilan

³ Zamroni, Drs, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992

⁴ *Ibid.*

⁵ *Manajemen dan Perencanaan Keuangan*, Gramedia, Jakarta, 1995, hal. 20

manajemen, ketrampilan seni juga dikembangkan melalui training. Ketrampilan manajemen juga dikembangkan dengan cara yang sama.

2. Luther Gulick.⁶

Mendefinisikan manajemen sebagai bidang pengetahuan yang mencari secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana orang-orang dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan dan mewujudkan kerjasama untuk mencapai tujuan dan mewujudkan kerjasama itu berguna untuk kemanusiaan. Manajemen memenuhi syarat untuk disebut sebagai bidang pengetahuan karena telah dipelajari bertahun-tahun dan telah diatur menjadi serangkaian teori-teori.

3. I.H. Walson dan Prof. Oey Liang Lie.⁷

Manajemen dinyatakan bahwa, manajemen sebagai ilmu dan seni. Sebagai ilmu karena manajemen merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang sistematis dan telah diterima sebagai kebenaran-kebenaran yang universal. Sebagai ilmu, manajemen memiliki asas-asas seperti ilmu lainnya yang disebut "asas manajemen". Manajemen dinyatakan sebagai seni karena keberhasilan pemimpin dalam usahanya mencapai tujuan dengan bantuan bawahan, selain itu diperlukan pemahaman dan pengalaman ilmu manajemen. Atasan mempengaruhi bawahan dengan wibawa, kharisma, atau seni memimpin orang. Dengan ilmu manajemen seorang pemimpin mampu mengenali dan mempelajari masalah-masalah dengan baik dan

menentukan sikap, mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara cepat dan tepat.

4. James A.F. Stoner⁸

Mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan.

Dari definisi diatas dapat ditarik beberapa pokok pikiran sebagai berikut :

- Proses adalah suatu cara sistematis untuk melakukan suatu manajemen yang didefinisikan sebagai suatu proses. Karena semua pemimpin memiliki kemampuan, keahlian, ketrampilan yang terlibat dalam kegiatan yang saling berkaitan dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
- Perencanaan, menunjukkan bahwa para pemimpin memikirkan tujuan dan kegiatan sebelum melaksanakan kegiatan pada suatu cara, rencana, logika.
- Pengorganisasian, berarti para pemimpin mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi.
- Memimpin ini menunjukkan bagaimana para pemimpin mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya, menggunakan orang lain untuk tugas tertentu. Pengawasan, para pemimpin berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dengan arah atau jalur tujuan, apabila organisasi berjalan pada jalur yang salah maka para pemimpin

mencapai tujuan tertentu, tetapi apapun tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi, manajemen strategis adalah suatu proses terpenting untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Otonomi Daerah

Otonomi pada dasarnya adalah merupakan hak atau wewenang untuk mengatur dan memerintah daerah atas inisiatif dan keamanan sendiri. Dimana daerah diberi kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan daerah dan dengan pembiayaan sendiri. Kebebasan yang diberikan bukanlah merupakan suatu kemerdekaan daerah yang terlepas dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi merupakan kemandirian yang berwujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.

Otonomi Daerah dalam menjalankan segala urusan yang ada di daerah menurut kemampuan sendiri sesuai dengan potensi-potensi yang ada menurut daerahnya sendiri.

Adapun Otonomi Daerah menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999 pasal 1 poin H adalah:

“Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Adapun Daerah Otonomi menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999 pasal 1 poin 6 adalah :

Masyarakat otonomi selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Republik Indonesia”.

Melihat pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah upaya optimalisasi potensi-potensi yang ada didaerah tersebut, karena pemerintah pusat mempunyai tugas-tugas yang cukup banyak, dan urusan-urusan yang bersentuhan dengan rakyat sedikit banyak akan terbengkalai, oleh karena itu daerah yang mengetahui potensi-potensi daerah diharapkan dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan penduduk daerah.

Kewenangan Pemerintah di bidang Pariwisata

Memperhatikan berlakunya desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah terjadi beberapa perubahan dan pergeseran kewenangan dalam perencanaan pembangunan nasional termasuk juga pada sektor pariwisata. Semua tanggungjawab pelaksanaan program-program pembangunan akan dilakukan oleh pemerintah daerah pada tingkat kabupaten/kota yang meliputi kewenangan dalam bidang pengembangan objek daerah tujuan wisata (ODTW), infrastruktur dan sumber daya manusia. Kewenangan pemerintah dalam bidang kepariwisataan yaitu :

- 1) Penetapan pedoman pembangunan dan pengembangan kepariwisataan.
- 2) Penetapan pedoman kerja sama internasional di bidang kepariwisataan.

3) Penetapan standar dan norma umum kepariwisataan 10

Urusan pariwisata yang diatur oleh pemerintah daerah meliputi :

- a Urusan objek wisata, sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan berlaku tidak menjadi hukum urusan pemerintah pusat.
- b Urusan pramuwisata.
- c Urusan perhotelan/losmen.
- d Urusan penginapan remaja.
- e Urusan Pondok wisata.
- f Urusan perkemahan.
- g Urusan rumah makan.
- h Urusan bar.
- i Urusan mandala wisata.
- j Urusan usaha kawasan wisata.
- k Urusan usaha rekreasi dan hiburan umum.
- l Urusan Promosi pariwisata daerah.

Apabila diperhatikan tentang komposisi beban dan tanggungjawab pelaksanaan pembangunan pemerintah kabupaten/kota sesungguhnya mempunyai kewenangan yang strategis dalam pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya yang dimiliki daerah

3. Pemerintah Daerah

Dalam pasal 1 ayat 1 UUD 45 menetapkan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, menganut azas Desentralisasi dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah

Selanjutnya dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan dengan jelas bahwa:

“Pembangunan Daerah di Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan Pemerintahan ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul Daerah yang bersifat Istimewa.”

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 tersebut hanya memberikan aturan pokok tentang pembangunan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Desentralisasi dan Dekonsentrasi. Sedangkan pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam Undang-undang organiknya sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa, pertimbangan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat yang tetap mencerminkan Pemerintahan yang bersendikan atas dasar permusyawaratan.

Dalam Undang-undang organik yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah sekarang yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1999, pengertian Pemerintah Daerah¹¹ adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Adapun perangkat daerah otonom adalah dinas-dinas yang membidangi berbagai bidang, dan termasuk didalamnya adalah Kantor Pariwisata sebagai penindak lanjut dari pemerintah daerah Kabupaten Magelang dalam menggali potensi pariwisata di daerahnya. Untuk melaksanakan tugas

membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang kepariwisataan, kantor pariwisata mempunyai fungsi :

- a Perumusan kebijakan teknis dibidang kepariwisataan.
- b Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dibidang kepariwisataan.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No.22 Tahun 1999 maka terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan pemerintahan daerah. Secara teoritis ada enam elemen utama yang membentuk pemerintahan daerah yaitu:¹²

- a Adanya urusan otonomi yang merupakan dasar dari kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- b Adanya kelembagaan yang merupakan perwujudan dari otonomi yang diserahkan kepada daerah.
- c Adanya personil pegawai yang bertugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga daerah.
- d Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
- e Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang mendapat legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan otonomi daerah.

¹¹ UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Karya utama Surabaya, hal 12

¹² Affandi, Nur Achmad, *Isu-isu Strategis Penataan Otonomi Daerah, dalam Strategi Pemberdayaan Daerah Dalam Konteks Otonomi, Yogyakarta 2000*

politik luar negeri, pertahanan dan keamanan peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya.

4. Pariwisata

Pengertian

Secara etimologis kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta. Kata ini terdiri dari dua suku kata, yaitu "Pari" dan "Wisata". Pari berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap. Sedangkan wisata berarti perjalanan berpergian.¹³

Oka A. Yoeti memberikan batasan pariwisata sebagai berikut :¹⁴

"Pariwisata sementara ini suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk menikmati keinginan untuk beraneka ragam."

Menurut Undang-undang No. 9 Tahun 1990

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha objek-objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.¹⁵

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dan dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain dan orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak bertujuan untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya dan semata-mata akan menjadi konsumen ditempat tersebut.

¹³ Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung, 1987, hal. 103.

¹⁴ *Ibid*, hal. 109.

¹⁵ UU No. 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata

5. Kebutuhan beristirahat

Salah satu yang menjadi tujuan wisatawan adalah bersantai, relax atau memanjakan diri, bersenang-senang, berolahraga dan bercengkrama dengan teman-teman lain.

6. Kebutuhan untuk berbelanja

Untuk keperluannya dalam perjalanan, atau membeli oleh-oleh sebagai kenang-kenangan sampai di rumah.

7. Kebutuhan untuk dokumentasi

Seperti membuat foto, video slides, untuk dijadikan bukti bahwa dia sudah pernah datang berkunjung pada suatu daerah atau negara atau kota tertentu.

Macam kebutuhan tersebut membuka peluang usaha yang luas mulai dari penyelenggaraan maskapai penerbangan menuju lokasi wisata, penyediaan hotel-hotel dan penginapan hingga pedagang-pedagang asongan yang menawarkan berbagai jasa pelayanan.

Pengembangan Obyek Wisata

Sektor pariwisata di Indonesia merupakan suatu usaha industri yang perlu dikembangkan, sejalan dengan besarnya pendapatan atau devisa negara yang diperoleh dari sektor satu ini. Pendapat diatas apabila kita analisis lebih jauh tertuang pada Inpres No.9 tahun 1969, pasal 3. Adapun isinya adalah sebagai berikut : “ Usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan industri pariwisata dan

didaerah tujuan wisata harus benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan wisatawan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pengadaan sarana yang sudah dibangun akan menjadikan pengeluaran yang sia-sia.

Pada saat ini sektor wisata adalah salah satu sektor yang menjadi andalan oleh pemerintah didalam memperoleh devisa yang besar. Alasan yang kuat terlahirnya pendapat demikian dikarenakan telah diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keindahan alam dan juga kebudayaannya yang beraneka ragam. Kondisi tersebut akan tampak jelas apabila kita mencermati pada obyek-obyek wisata serta masyarakat yang ada di daerah-daerah, diantaranya obyek wisata Candi Borobudur dan Kawasan Gunung Merapi dan Merbabu yang ada di Kabupaten Magelang. Tujuan akhir yang ingin dicapai tiada lain adalah tujuan ekonomi yaitu di dalam mendatangkan pendapatan (uang) bagi daerahnya, atau dapat dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

- (a) Hasil pajak daerah
- (b) Hasil retribusi daerah
- (c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan
- (d) Lain-lain dari pendapatan yang sah.

Dari sektor pariwisata pemerintah dapat memperoleh pemasukan dari :

- 1). Tiket masuk pengunjung
- 2). Retribusi parkir wisata

Untuk lebih menambah dan meningkatkan PAD ini maka pihak pemerintah daerah perlu mengembangkan sektor pariwisata atau obyek wisata yang ada di daerahnya.¹⁸ Pengembangan obyek wisata ini dapat dilakukan pada dua segi, yaitu :

1. Dari segi Fisik

- Membangun sarana dan prasarana pariwisata di lokasi obyek wisata.
- Melengkapi sarana dan prasarana pariwisata yang sudah ada dilokasi obyek wisata.

2. Dari segi non fisik

- Meningkatkan pelayanan kepada para pengunjung, dengan meningkatkan sumber daya manusia sebagai pengelola obyek wisata.
- Memunculkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah sehingga dapat dinikmati oleh para pengunjung.
- Memperhatikan sesuatu yang khas yang ada di daerah seperti makanan khas, kerajinan-kerajinan khas.

¹⁸ Oka A. Yani, *Perencanaan Pembangunan Daerah: Analisis Kebijakan Daerah*, 1996, hal. 46

Bersumber pada penjelasan diatas mengenai pengembangan obyek wisata terlihat tampak dengan jelas pengembangan melalui dua segi, baik itu segi fisik maupun non fisik dapat mewujudkan pengembangan pariwisata (obyek wisata) ke arah yang lebih baik. Selain itu pengembnagan obyek wisata yang berjalan dengan terprogram akan mendorong timbulnya industri-industri pariwisata yang dapat menunjang kenyamanan bagi para pengunjung. Implementasi dari semua itu berpengaruh di dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar obyek wisata karena tenaganya terserap oleh industri pariwisata tersebut. Disamping usaha mengembangkan obyek wisata Pemda dapat melakukan langkah-langkah kongkrit yang pasti guna mengenalkan pada masyarakat mengenai keberadaan obyek wisata tersebut. Adapun bentuk uasaha tersebut dinamakan promosi. Dengan adanya promosi ini maka daerah tersebut akan dapat dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas, baik tentang keindahannya, kebudayaannya maupun kekhasannya ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang ada di obyek wisata.

Sarana dan prasarana baik dari segi fisik dan non fisik yang lengkap serta didukung adanya promosi yang gencar, maka wisatawan akan tertarik untuk datang berkunjung ke lokasi obyek wisata tersebut dan pengunjungpun akan merasa nyaman dan betah, karena didukung oleh sarana yang memadai. Setelah kita mengetahui penjelasan diatas maka terbayang oleh kita keintensifan proses promosi wisata, baik melalui berbagai macam cara yang sangat membantu untuk meningkatkan

wisata tersebut. Pada masa sekarang dan yang akan datang sudah saatnya negara kita mengembangkan bisnis pariwisata, dengan tujuan mendatangkan devisa dan investasi asing agar turut andil di dalam mengembangkan obyek wisata yang ada di daerah-daerah.

4. Definisi Konseptual

1. Pemerintah Daerah

- Pemerintah Daerah adalah bagian dari pemerintah suatu negara yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan suatu undang-undang yang mempunyai lembaga-lembaga /badan-badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih oleh masyarakat daerah tersebut dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di wilayah kekuasaannya.

2. Pengembangan merupakan usaha memperbesar, menyempurnakan dan memperbaiki yang telah ada.
3. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
4. Manajemen strategis adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan.

5. Objek wisata adalah perwujudan ciptaan manusia, tata hidup seni budaya, sejarah bangsa, tempat atau keadaan alam dan segala sesuatu yang memiliki daya tarik dan menjadi sasaran wisata.

6. Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata

Strategi pemerintah dalam pengembangan pariwisata merupakan usaha/rencana kegiatan pemerintah dalam mengemban tugas kemasyarakatan untuk melaksanakan jalannya pemerintahan dan pembangunan. Sebagai perwujudan dari tugas ini pemerintah melaksanakan kegiatan pengembangan pariwisata.

5. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian. Definisi operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Definisi Operasional berfungsi untuk mengetahui cara mengukur suatu variabel, sehingga seseorang dapat mengetahui baik/buruknya suatu pengukuran.¹⁹

Indikator-indikator yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

Strategi pengembangan kepariwisataan melalui:

1. Aspek Pengembangan Fisik

- Ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata dilokasi obyek wisata.
- Kelengkapan / kecukupan sarana dan prasarana yang sudah ada di obyek wisata.

Merapi dan Merbabu. Serta masih banyak lagi potensi pariwisata yang dapat dikembangkan.

Didukung lagi oleh letak Kabupaten Magelang yang berbatasan langsung dengan Propinsi D I Yogyakarta yang merupakan pintui gerbang wisata internasional.

4. Tehnik Pengumpulan Data

- a. Observasi, kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data primer. Dalam penelitian ini obserfasi yang dilakukan bersifat non-partisan, hanya mendengarkan dan memperhatikan kegiatan dinas dan menarik kesimpulan dari pengamatan tersebut.
- b. Wawancara langsung kepada responden yaitu Kasi objek wisata kantor pariwisata kabupaten Magelang: Edi Purwanto,SH,S.Sos.
- c. Dokumentasi, yaitu kegiatan pengumpulan data dari sumber sekunder, data tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk dokumen. Data tersebut antara lain berupa publikasi pemerintah, statistik arus wisata, laporan hasil kegiatan dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Husaini Usman dsan Purnomo Setiadi Akbar menjelaskan bahwa :

Analisa data bertujuan untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapat informasi baru dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki.²¹

Sesuai jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, maka data yang diperoleh dari penelitian tersebut dianalisa dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif. Yang dimaksud analisa data kualitatif menurut Faried Ali adalah :

“Analisa data kualitatif adalah suatu analisis yang didasarkan pada argumentasi kualitatif logika. Namun materi argumentasi didasarkan pada data yang diperoleh melalui kegiatan teknik perolehan melalui kegiatan teknik perolehan data.”²²

Kegiatan perolehan data dilakukan melalui studi lapangan maupun studi pustaka, dimana dalam proses penganalisaannya tidak berdasarkan pada perhitungan kualitatif tetapi pada kemampuan analisis peneliti dalam menghubungkan fakta data dan informasi unuk menghasilkan suatu teori.

Menurut Patton Analisa data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini, proses analisa data yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber (wawancara, pengamatan serta data sekunder).
- 2) Menyusun data guna menemukan hubungan antara data yang memungkinkan untuk disusun ke dalam satuan-satuan yang dikategorikan.

²² Ali, Faried, *Methodologi Penelitian Sosial dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hal. 100.

- 3) Menyusun data secara tertulis.
- 4) Menganalisis data yang ada dan memahaminya untuk menghasilkan